

## **ABSTRAK**

**Budi Prayitno, 2022. Arah Kebijakan Penanggulangan Kasus Narkoba di Provinsi Sumatera Barat. Disertasi. Pascasarjana Universitas Negeri Padang**

Keterkaitan antara kriminalitas, dinamika spasial dan disfungsi sosial masyarakat menjadi salah faktor penentu tingkat kenyamanan suatu kota. Sejak memasuki dekade kedua abad 21. Salah satu tindak kriminalitas yang hari-hari ini semakin bertambah dan semakin susah diberantas adalah narkoba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan populasi wilayah yaitu seluruh kabupaten/kota di seluruh Provinsi Sumatera Barat. Data menggunakan data primer yang didapatkan dari pengisian kuesioner oleh responden. Data sekunder menggunakan data yang didapatkan dari instansi. Teknik analisis data menggunakan metode analisis spasial, analisis statistik deskriptif, analisis autokorelasi spasial, analisis tingkat pertumbuhan ekonomi dan analisis skala likers untuk analisis arah kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola spasial kasus narkoba di provinsi Sumatera Barat tersebar di seluruh kabupaten/Kota. Kota padang merupakan wilayah yang paling banyak memiliki kasus narkoba dan tersangka kasus narkoba. Faktor ekonomi dan faktor sosial menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pola autokorelasi spasial. semakin tinggi jumlah penduduk maka juga semakin tinggi kasus narkoba. Model spasial kasus narkoba berdasarkan analisis indeks moran antara jumlah penduduk, angkatan kerja, tingkat pengangguran, dan kemiskinan dengan kasus narkoba adalah pola cluster (autokorelasi spasial positif). Sedangkan pola autokorelasi spasial antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kasus narkoba adalah pola acak, terdapat autokorelasi spasial negatif. Implementasi kebijakan penanggulangan kasus narkoba di Sumatera barat dilihat dari indikator komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, kecenderungan, hubungan antar organisasi, dan pelaksanaan program secara umum sudah berjalan dengan baik. Namun, jika dilihat dari masing-masing indikator kebijakan menunjukkan adanya perbedaan dalam keberhasilan implementasi program di kebijakan tersebut.

## **ABSTRACT**

**Budi Prayitno, 2022. Policy Direction for Overcoming Drug Cases in West Sumatera Province. Post Graduate Program of Universitas Negeri Padang.**

The relationship between crime, spatial dynamics and social dysfunction of the community is one of the determining factors for the comfort level of a city. Since entering the second decade of the 21st century. One of the crimes that are increasing and increasingly difficult to eradicate is drugs. This study uses a quantitative approach. This study uses a regional population, namely all districts/cities throughout the province of West Sumatra. Data using primary data obtained from filling out questionnaires by respondents. Secondary data uses data obtained from agencies. Data analysis techniques used spatial analysis methods, descriptive statistical analysis, spatial autocorrelation analysis, economic growth rate analysis and Likers scale analysis for policy direction analysis.

The results of the study indicate that the spatial pattern of drug cases in the province of West Sumatra is spread across all districts/cities. The city of Padang is the area that has the most drug cases and drug suspects. Economic factors and social factors are factors that influence the spatial autocorrelation pattern. The higher the population, the higher the drug cases. Spatial model of drug cases based on Moran index analysis between population, labor force, unemployment rate, and poverty with drug cases is a cluster pattern (positive spatial autocorrelation). While the spatial autocorrelation pattern between Regional Original Income (PAD) and drug cases is a random pattern, there is a negative spatial autocorrelation. The implementation of drug case management policies in West Sumatra is seen from the indicators of communication, resources, bureaucratic structure, trends, inter-organizational relations, and program implementation in general has been going well. However, when viewed from each policy indicator, it shows that there are differences in the success of program implementation in the policy.